

2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

RANWAL

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2023-2026

RENSTRA

- **VISI**
- **MISI**
- **TUJUAN**
- **SASARAN**
- **KEBIJAKAN**
- **STRATEGIK**
- **PROGRAM**
- **KEGIATAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 merupakan Pengaplikasian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa Kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2023-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan kondisi pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekuranganyang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi RPJP Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 yaitu ***“UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT ACEH SINGKIL YANG ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, AMAN DAN TERTIB MELALUI PEMERINTAHAN YANG BAIK”***.

Singkil, 08 Februari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Singkil

HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si

NIP. 19790802 200504 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya SKPK	8
2.3. Kinerja Pelayanan SKPK	8
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .	11
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT- DAERAH	14
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas- Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPK	14
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah- dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	14
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	16
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	18
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	20
4.1. Tujuan	20
4.2. Sasaran	20
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	22
5.1. Strategi	22
5.2. Arah Kebijakan	22

BAB VI	: PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF	24
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG- URUSAN	35
BAB VIII	: PENUTUP	36



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang wajib disusun / ditetapkan oleh setiap instansi pemerintah guna menjawab tuntutan internal dan eksternal yang berada dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil Tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023-2026, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
18. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026.
20. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud penyusunan dan penetapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program/kegiatan dan target sesuai dengan kemampuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil tahun 2023-2026;

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Revisi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta penyusunan Renja, RKPK serta Anggaran;
2. Sebagai Pedoman evaluasi penilaian atas pelaksanaan program kegiatan dan Laporan Kinerja secara periode dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil 2023-2026 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I Pendahuluan, dengan sub bahasan: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan;
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dengan sub bahasan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPK, Kinerja Pelayanan SKPK, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dengan sub bahasan: Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan SKPK, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dengan sub bagian Tujuan dan Sasaran.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan dengan Sub Pembahasan : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.
- BAB VII Indikator Kinerja SKPK.
- BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

Kepala Badan membawahi Sekretaris dan 5 (lima) bidang, yaitu :

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Pendapatan
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Bidang Perbendaharaan
7. UPTB

Berikut uraian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil :

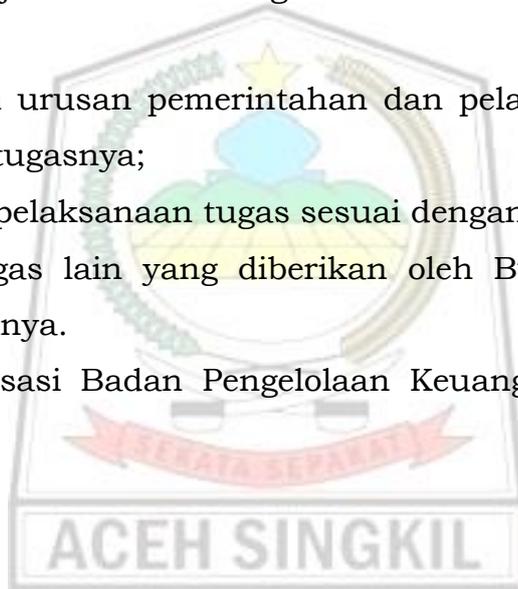
- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
 - Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Pendapatan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
 - Sub Bidang Pengembangan, Pertimbangan & Keberatan
 - Sub Bidang Penagihan dan Penatausahaan
- c. Bidang Kekayaan & Aset Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan
 - Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan
 - Sub Bidang Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - Sub Bidang Akuntansi
 - Sub Bidang Pembukuan
 - Sub Bidang Perhitungan Keuangan

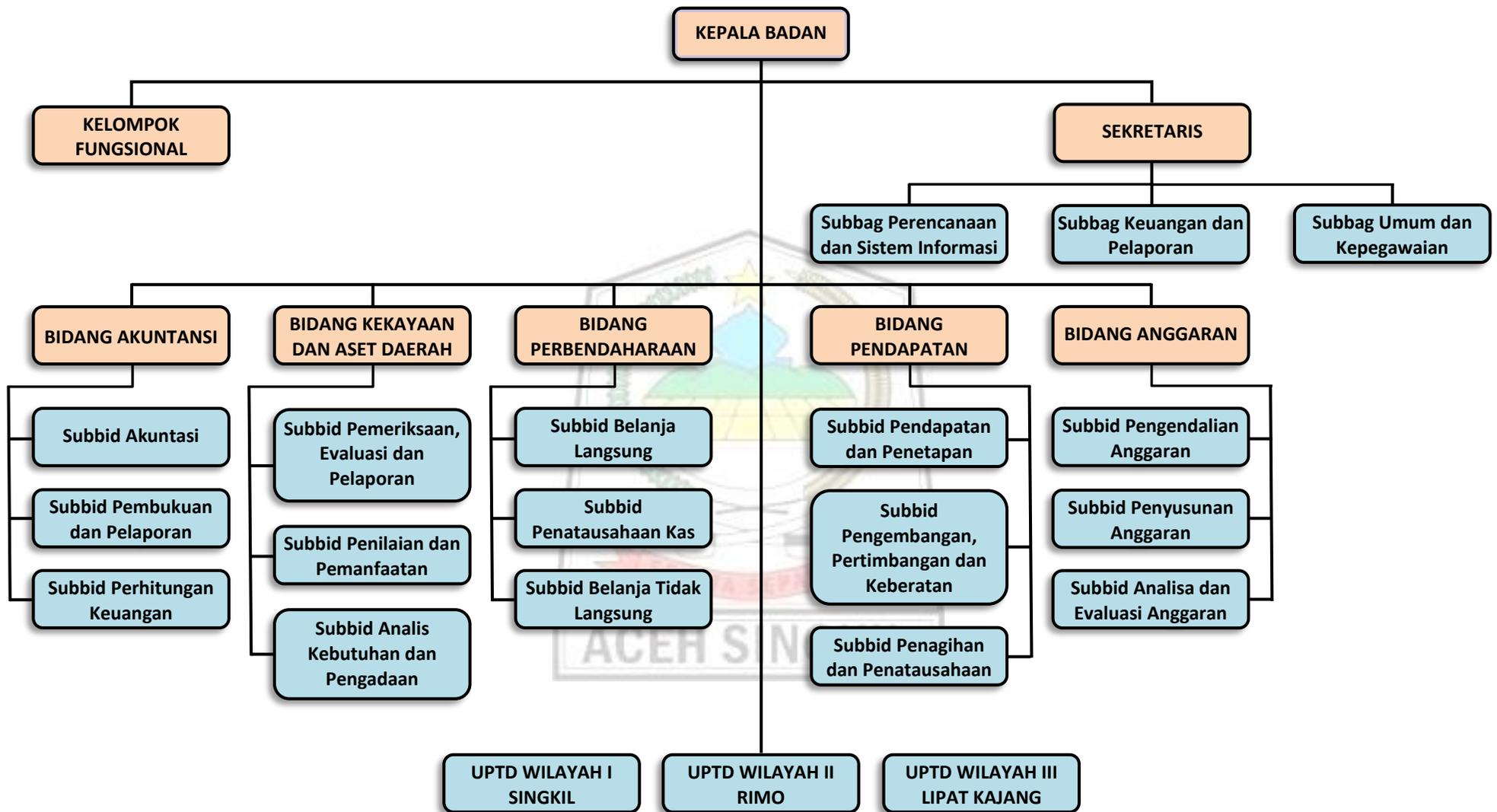
- e. Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran
- f. Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - Sub Bidang Belanja Langsung
 - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - Sub Bidang Penatausahaan Kas
- g. UPTB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidangnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Terlampir).





2.2 Sumber Daya SKPK

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran budgeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Subbag/Subbid	18
5	Kepala UPT Badan	3
6	Fungsional	79

Jumlah personil PNS dan Non PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berjumlah sebanyak 107 (seratus tujuh) orang (Tabel 2.2.2).

Tabel 2.2.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

Jabatan/Eselonering	Jumlah PNS
Eselon II	1 Orang
Eselon III	6 orang
Eselon IV	21 Orang
Staf PNS	33 Orang
Staf non PNS	46 Orang
Total	107 Orang

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan SKPK

Adapun Kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh BPK adalah pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Audit BPK	-	-	-	-	Audit BPK	-	-	-	-
2.	Persentase Tingkat Pemahaman SKPK dalam menggunakan Aplikasi Barang daerah	%	95%	70%	80%	85%	95%	85%	-	-	-	-	89,47%	-	-	-	-
3.	Persentase Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,006%	-	-	-	-	120,00 %	-	-	-	-
4.	Persentase Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	%	99%	60%	70%	80%	90%	76,57%	-	-	-	-	77,34%	-	-	-	-

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1	2	3	4	5	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	24.068.492,00	24.429.519,38	24.795.962,17	25.167.901,60	18.807.800,00					94,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.814.366.752,00	25.305.374.806,25	25.684.955.428,34	26.070.229.759,77	26.461.283.206,17	9.643.349.917,00					54,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	172.549.068.316,00	155.614.166.203,93	157.948.378.696,99	160.317.604.377,44	162.722.368.443,11	150.851.613.056,00					87,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	678.585.382,00	740.119.740,15	751.221.536,25	762.489.859,30	773.927.207,19	466.887.370,00					68,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.063.732.350,00	888.756.482,25	902.087.829,48	915.619.146,93	929.353.434,13	841.967.890,00					79,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%
JUMLAH	192.125.752.800,00	182.572.485.724,58	185.311.073.010,45	188.090.739.105,61	190.912.100.192,19	161.822.626.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,50%	0,00%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Untuk mengamankan Proyeksi rencana pendapatan yang terformulasi dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2023-2026 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2017-2022.

No	Kelemahan	No	Kekuatan
	Faktor Internal		Faktor Internal
1.	Kemampuan Teknis Fungsional	1.	Adanya Perda SOPD
2.	Standarisasi Beban Kerja	2.	Kualitas SDM Aparatur
3.	Sarana prasarana yang sudah tidak memadai	3.	Komitmen Aparatur yang tinggi

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2023-2026.

2.4.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil untuk tahun 2023-2026, yaitu:

No	Peluang	No	Tantangan
	Eksternal		Eksternal
1.	Peran BPKK yang Strategis	1.	Perbedaan persepsi dalam membaca Peraturan dengan pemeriksa fungsional

No	Peluang	No	Tantangan
	Eksternal		Eksternal
2.	Kepercayaan pimpinan	2.	Masyarakat semakin kritis
3.	Mudah berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat	3.	Informasi semakin terbuka dan perubahan Peraturan yang sangat cepat

2.4.3 Rumusan permasalahan strategis yang dihadapi masa kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal termasuk pula stakeholders yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

2.4.4 Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi

Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Revisi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.

2.4.5 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang diperlukan untuk lebih efisien dan efektif.

Formulasi antara faktor internal dan faktor eksternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor eksternal (KAEI).

KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)

No	Lingkungan	Bobot	Rating	Score (Bobot x Rating)	Prioritas
Kekuatan					
1.	Adanya Perda SOPD	20	4	80	I
2.	Kualitas SDM Aparatur	15	4	60	II
3.	Komitmen Aparatur yang tinggi	15	3	45	III
Kelemahan					
1.	Kemampuan Teknis Fungsional	25	4	100	I
2.	Standarisasi Beban Kerja	15	3	45	II
3.	Sarana Prasarana yang sudah tidak memadai	10	2	20	III
Jumlah		100		350	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPK

Analisis faktor eksternal Yang menjadi peluang prioritas pertama adalah peran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil yang strategis sedangkan yang menjadi tantangannya adalah Globalisasi, prioritas kedua dalam peluang adalah adanya kepercayaan pimpinan namun dalam tantangan prioritas kedua tantangannya adalah adanya Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa dan prioritas yang ketiga adalah mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Informasi yang terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. VISI

Adapun Visi Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang telah tertuang pada dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJP Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Singkil nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil periode tahun 2005-2025 yang diundangkan pada tanggal 31 Januari 2011, Visi Kabupaten Aceh Singkil dalam RPJP Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 adalah ***“UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT ACEH SINGKIL YANG ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, AMAN DAN TERTIB MELALUI PEMERINTAHAN YANG BAIK”***.

Penjabaran terhadap rekomendasi visi tersebut antara lain :

1. Terwujudnya ekonomi daerah yang tangguh artinya daerah memiliki beberapa komoditas unggulan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi baik ditingkat regional, nasional maupun global;

2. Maju artinya bahwa masyarakat aceh singkil berkembang di segala sektor;
3. Sejahtera arti bahwa masyarakat aceh singkil yang makmur dibidang perekonomian,berpenghasiln cukup, memiliki lapangan kerja yang luas dan layak, tingkat pengangguran yang kecil, terbebas dari kemiskinan, keterisolasian, ketertinggalan dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi;
4. Bermartabat memberikan arti bahwa masyarakat aceh singkil terbebas dari ketergantungan dalam makna mampu bersaing, memiliki kreativitas yang tinggi, masyarakat yang memiliki kemampuan inovasi yang tinggi, bebas dari berbagai pengaruh dan ancaman, mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam segala sendi-sendi kehidupan;
5. Berlandaskan nilai-nilai islami memberikan makna bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Singkil adalah masyarakat yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Rasulnya, taat kepada ulama, dan patuh kepada kepemimpinan yang berkuasa, beramal shalih, berakhlak mulia, saling hormat menghormati dan hidup berdasarkan ridha Allah SWT.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil masa depan ditetapkan misi pembangunan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah;
3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor *economic base* yaitu sektor pertanian dan industri

- pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing;
4. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu industri dan pariwisata;
 5. Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang kondusif, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai IPTEK;
 6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi dan kemiskinan;
 7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang islami.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan misi-misi pembangunan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

1. Perbaiki tata kelola pemerintahan;
2. Menciptakan pendidikan berkualitas yang islami berbasis kearifan lokal;
3. Menciptakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang responsif, cepat dan berkualitas merata diseluruh wilayah;
4. Menciptakan ketahanan ekonomi berbasis kemandirian dan kerakyatan;
5. Optimalisasi potensi sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Menciptakan iklim investasi yang cepat dan kondusif, memiliki kepastian hukum;
7. Menciptakan penyelesaian yang responsif terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Peluang Eksternal

Peluang yang sangat mendukung kelancaran dalam pencapaian visi dan misinya antara lain:

- a. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- b. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan latihan dalam dan luar negeri bagi setiap pegawai;
- d. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

3.3.2. Tantangan

Selain peluang diuraikan diatas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran SKPK harus lebih responsif terhadap dinamika pengelolaan keuangan daerah;
- d. Tumbuhnya daya saing sumber daya SKPK menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Badan

Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Singkil dengan memanfaatkan potensi dan peluang serta mendongkrak Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah Penerapan Standar Pelayanan dalam Pengelolaan Keuangan;

- e. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
- f. Pemberian Pelayanan kepada SKPD secara maksimal tanpa ada keluhan sebagai instansi Pembina penyelenggaraan Pelayanan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada SKPK. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada SKPK, maka SKPK dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Aceh Singkil;
- 2) Optimalisasi pelayanan SKPK harus terus memacu partisipasi masyarakat dan semua kalangan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mempermudah akses informasi Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah.

Terlebih jika dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial*

Resposipility (CSR), maka daerah harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan didukung dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Prima SKPK di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- 3) Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tentang pengembangan bidang Perikanan, Pariwisata, Perkebunan dan Pertanian yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Kab. Aceh Singkil harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, yaitu:

1. Menjadikan Birokrasi menjadi lebih adaptif cepat dalam melayani dan tepat dalam mengambil keputusan.

4.2 Sasaran

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam Sasaran. Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Opini audit BPK atas Laporan Keuangan;
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Sinergitas dan Realistis.



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA							
NO	URAIAN	NO	URAIAN	NO	URAIAN	SAT	TARGET TAHUN				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menjadikan Birokrasi menjadi lebih adaptif cepat dalam melayani dan tepat dalam mengambil keputusan	1.	Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	1.	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2.	Persentase Tingkat Pemahaman SKPK dalam menggunakan Aplikasi Barang Daerah	%	60	70	80	85	95
		2.	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Sinergitas dan Realistis	3.	Persentase Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	%	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
				4.	Persentase Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	%	50	60	70	80	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan sudah tersedianya Perda SOPD, Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari uraian tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 strategi yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Mengoptimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaporan, evaluasi pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur (SOP) yang ada.

5.2 Arah Kebijakan

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah :

1. Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan dan capaian kinerja;
2. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah sebagai penunjang tupoksi SKPK.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Misi : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menjadikan Birokrasi menjadi lebih adaptif cepat dalam melayani dan tepat dalam mengambil keputusan	1. Opini audit BPK atas Laporan Keuangan	1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1. Optimalisasi peningkatan pengembangan sistem pelaporan keuangan dan capaian kinerja
	2. Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Sinergitas dan Realistis	2. Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah	2. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
		3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaporan, evaluasi pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur (SOP) yang ada	3. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah sebagai penunjang tupoksi SKPK



BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PAGU INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan organization progress. Adapun program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun kegiatannya adalah:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan dalam Program ini terdiri dari :

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5. Program dan Kegiatan Lintas SKPD

Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2023-2026 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPK yang dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Program, Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Serta Pendanaan Indikatif BPKK Aceh Singkil 2023-2026
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUBSUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			192.125.752.800,00		182.572.485.724,58		185.311.073.010,45		188.090.739.105,61		190.912.100.192,19		190.912.100.192,19	
5 02	KEUANGAN			192.125.752.800,00		182.572.485.724,58		185.311.073.010,45		188.090.739.105,61		190.912.100.192,19		190.912.100.192,19	
5 02 01	PROGRAM UNSUBSUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah	%	17.814.366.752,00	70	25.305.374.806,25	70	25.684.955.428,34	80	26.070.229.759,77	85	26.461.283.206,17	85	26.461.283.206,17	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah serta laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	%	46.200.000,00	70	50.724.523,50	70	51.485.391,35	80	52.257.672,22	85	53.041.537,31	85	53.041.537,31	
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA	Dok	22.200.000,00	8	19.700.642,50	8	19.996.152,14	8	20.296.094,42	8	20.600.535,84	8	20.600.535,84	
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-P, DPA-Pergeseran I,II,III, dan IV serta DPPA	Dok	24.000.000,00	8	20.873.881,00	8	21.186.989,22	8	21.504.794,05	8	21.827.365,96	8	21.827.365,96	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen (RENSTRA, IKU, RENJA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan LAKIP)	Laporan	-	25	10.150.000,00	25	10.302.250,00	25	10.456.783,75	25	10.613.635,51	25	10.613.635,51	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya kegiatan administrasi keuangan BPKK Aceh Singkil	%	13.299.483.400,00	70	21.312.299.637,16	70	21.631.984.131,72	80	21.956.463.893,69	85	22.285.810.852,10	85	22.285.810.852,10	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kesejahteraan ASN melalui Gaji ASN	Orang	13.173.883.400,00	67	21.229.076.366,61	67	21.547.512.512,11	67	21.870.725.199,79	67	22.198.786.077,79	67	22.198.786.077,79	
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhiya tindak lanjut penyelesaian Tanggapan Pemeriksaan atau TPTGR	Bulan	54.250.000,00	12	35.792.320,55	12	36.329.205,36	12	36.874.143,44	12	37.427.255,59	12	37.427.255,59	
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BPKK Aceh Singkil	Bulan	71.350.000,00	12	47.430.950,00	12	48.142.414,25	12	48.864.550,46	12	49.597.518,72	12	49.597.518,72	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah BPKK Aceh Singkil	%	120.800.000,00	70	159.480.210,40	70	161.872.413,56	80	164.300.499,76	85	166.765.007,26	85	166.765.007,26	
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terciptanya tertib keseragaman Pakaian Dinas Harian ASN dan Non ASN	Orang	66.000.000,00	110	64.960.000,00	110	65.934.400,00	110	66.923.416,00	110	67.927.267,24	110	67.927.267,24	
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian/ASN	Bulan	29.800.000,00	12	54.935.210,40	12	55.759.238,56	12	56.595.627,13	12	57.444.561,54	12	57.444.561,54	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas ASN dengan adanya Pelatihan/Bimtek	Bulan	25.000.000,00	12	39.585.000,00	12	40.178.775,00	12	40.781.456,63	12	41.393.178,47	12	41.393.178,47	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kegiatan administrasi umum perangkat daerah BPKK Aceh Singkil	%	1.839.683.352,00	70	1.208.944.869,34	70	1.227.079.042,38	80	1.245.485.228,01	85	1.264.167.506,43	85	1.264.167.506,43	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Keg	40.280.000,00	1	40.618.777,50	1	41.228.059,16	1	41.846.480,05	1	42.474.177,25	1	42.474.177,25	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kualitas pekerjaan kantor dengan bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor	Keg	633.910.000,00	1	177.602.252,84	1	180.266.286,63	1	182.970.280,93	1	185.714.835,14	1	185.714.835,14	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terseadinya Peralatan Rumah Tangga dan terciptanya kebersihan kantor	Bulan	11.440.000,00	12	16.143.473,50	12	16.385.625,60	12	16.631.409,99	12	16.880.881,14	12	16.880.881,14	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terseadinya Bahan Logistik Kantor/Alat Tulis Kantor	Bulan	137.640.000,00	12	144.294.430,00	12	146.458.846,45	12	148.655.729,15	12	150.885.565,08	12	150.885.565,08	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terseadinya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Bulan	206.170.000,00	12	190.121.375,50	12	192.973.196,13	12	195.867.794,07	12	198.805.810,99	12	198.805.810,99	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terseadinya Majalah, Koran, dan Media (Bahan bacaan)	Bulan	70.000.000,00	12	63.544.075,00	12	64.497.236,13	12	65.464.694,67	12	66.446.665,09	12	66.446.665,09	
5 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terseadinya Makanan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu	Bulan	100.000.000,00	12	92.517.250,00	12	93.905.008,75	12	95.313.583,88	12	96.743.287,64	12	96.743.287,64	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Pegawai BPKK Aceh Singkil	Bulan	499.193.352,00	12	358.365.035,00	12	363.740.510,53	12	369.196.618,18	12	374.734.567,46	12	374.734.567,46	
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terseadinya Penataan Arsip yang baik dan dinamis	Bulan	18.050.000,00	12	40.478.200,00	12	41.085.373,00	12	41.701.653,60	12	42.327.178,40	12	42.327.178,40	
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terseadinya Akun Cloud Hosting Aplikasi dan Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Bulan	123.000.000,00	12	85.260.000,00	12	86.538.900,00	12	87.836.983,50	12	89.154.538,25	12	89.154.538,25	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana menjalankan Pelayanan Pemerintah Daerah	%	157.900.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pekerjaan dan pelayanan dengan bertambahnya sarana pelayanan berupa bangunan gedung kantor	Paket	157.900.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya listrik, jasa pelayanan umum kantor dan jasa surat menyurat	%	1.631.000.000,00	70	1.863.045.752,86	70	1.890.991.439,15	80	1.919.356.310,74	85	1.948.146.655,40	85	1.948.146.655,40	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kegiatan jasa surat menyurat	Bulan	25.000.000,00	12	28.876.750,00	12	29.309.901,25	12	29.749.549,77	12	30.195.793,02	12	30.195.793,02	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya listrik	Bulan	170.200.000,00	12	202.194.147,86	12	205.227.060,07	12	208.305.465,97	12	211.430.047,96	12	211.430.047,96	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas ASN dengan tersedianya Insentif atau Honorarium	Bulan	1.435.800.000,00	12	1.631.974.855,00	12	1.656.454.477,83	12	1.681.301.294,99	12	1.706.520.814,42	12	1.706.520.814,42	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	719.300.000,00	70	710.879.813,00	70	721.543.010,20	80	732.366.155,35	85	743.351.647,68	85	743.351.647,68	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pajak dan Pemeliharaan/Rehab Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	20.900.000,00	12	74.449.438,00	12	75.566.179,57	12	76.699.672,26	12	77.850.167,35	12	77.850.167,35	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Bahan Bakar dan Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	180.000.000,00	12	182.420.875,00	12	185.157.188,13	12	187.934.545,95	12	190.753.564,14	12	190.753.564,14	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya kualitas pekerjaan kantor dengan terpeliharanya/terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor BPKK Aceh Singkil	Bulan	77.000.000,00	12	83.148.800,00	12	84.396.032,00	12	85.661.972,48	12	86.946.902,07	12	86.946.902,07	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pekerjaan kantor dengan terpeliharanya/terawatnya bangunan gedung kantor BPKK Aceh Singkil	Bulan	441.400.000,00	12	370.860.700,00	12	376.423.610,50	12	382.069.964,66	12	387.801.014,13	12	387.801.014,13	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	%	172.549.068.316,00	70	155.614.166.203,93	75	157.948.378.696,99	80	160.317.604.377,44	95	162.722.368.443,11	95	162.722.368.443,11	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah	Terpenuhinya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	1.410.868.116,00	70	1.394.680.745,50	75	1.415.600.956,68	80	1.436.834.971,03	95	1.458.387.495,60	95	1.458.387.495,60	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	Tahun	112.830.158,00	1	77.513.012,50	1	78.675.707,69	1	79.855.843,30	1	81.053.680,95	1	81.053.680,95	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya dokumen perubahan KUA dan PPAS	Tahun	112.830.158,00	1	77.513.012,50	1	78.675.707,69	1	79.855.843,30	1	81.053.680,95	1	81.053.680,95	
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terpenuhinya koordinasi penyusunan RKA SKPD dan meningkatnya kualitas penyusunan RKA SKPD	SKPK	2.575.000,00	49	6.934.480,00	49	7.038.497,20	49	7.144.074,66	49	7.251.235,78	49	7.251.235,78	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya koordinasi penyusunan RKA Perubahan SKPD dan meningkatnya kualitas penyusunan RKA Perubahan SKPD	SKPK	2.575.000,00	49	6.934.480,00	49	7.038.497,20	49	7.144.074,66	49	7.251.235,78	49	7.251.235,78	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terpenuhinya koordinasi penyusunan DPA SKPD dan meningkatnya kualitas penyusunan DPA SKPD	SKPK	2.875.000,00	49	6.934.480,00	49	7.038.497,20	49	7.144.074,66	49	7.251.235,78	49	7.251.235,78	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terpenuhinya koordinasi penyusunan DPA SKPD dan meningkatnya kualitas penyusunan Perubahan DPA SKPD	SKPK	2.875.000,00	49	6.934.480,00	49	7.038.497,20	49	7.144.074,66	49	7.251.235,78	49	7.251.235,78	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terseadinya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tahun	652.654.000,00	1	689.792.579,00	1	700.139.467,69	1	710.641.559,70	1	721.301.183,10	1	721.301.183,10	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terseadinya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tahun	324.002.000,00	1	296.128.889,00	1	300.570.822,34	1	305.079.384,67	1	309.655.575,44	1	309.655.575,44	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tahun	96.203.000,00	1	140.462.906,50	1	142.569.850,10	1	144.708.397,85	1	146.879.023,82	1	146.879.023,82	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemahaman dalam penyusunan anggaran dengan adanya kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tahun	101.448.800,00	1	85.532.426,00	1	86.815.412,39	1	88.117.643,58	1	89.439.408,23	1	89.439.408,23	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	%	444.500.000,00	75	906.004.631,00	80	919.594.700,47	80	933.388.620,97	85	947.389.450,29	85	947.389.450,29	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Adanya Sinkronisasi Data Kas Umum Daerah dan Optimalisasi Akuntabilitas Penatausahaan Kas Daerah	Keg	52.434.000,00	8	87.229.100,00	8	88.537.536,50	8	89.865.599,55	8	91.213.583,54	8	91.213.583,54	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terkendalinya Anggaran Kas Guna Menunjang Tertib Administrasi Belanja Daerah dan Penerbitan SPD	Bulan	60.000.000,00	12	87.954.825,00	12	89.274.147,38	12	90.613.259,59	12	91.972.458,48	12	91.972.458,48	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Adanya Sinkronisasi Data Penerimaan dan Belanja Yang Bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	Keg	157.091.000,00	6	200.175.153,50	6	203.177.780,80	6	206.225.447,51	6	209.318.829,23	6	209.318.829,23	
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Tercapainya Program Transaksi Non Tunai Pada Seluruh Proses Transaksi Belanja Yang Bersumber Dari APBK	Keg	30.865.000,00	2	24.969.000,00	2	25.343.535,00	2	25.723.688,03	2	26.109.543,35	2	26.109.543,35	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terkoordinirnya Rekonsiliasi Data pada Kas Umum Daerah dengan Kas Pada SKPK	Dok	27.540.000,00	6	50.633.275,00	6	51.392.774,13	6	52.163.665,74	6	52.946.120,72	6	52.946.120,72	
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Adanya Sinkronisasi Data Laporan Arus Kas Daerah Berdasarkan SP2D Keluar Antara BUD dan SKPK	Keg	52.190.000,00	4	103.215.350,00	4	104.763.580,25	4	106.335.033,95	4	107.930.059,46	4	107.930.059,46	
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Regulasi Yang Berhubungan Dengan Penatausahaan Keuangan, Belanja dan Kas Daerah	Keg	64.380.000,00	4	149.421.195,00	4	151.662.512,93	4	153.937.450,62	4	156.246.512,38	4	156.246.512,38	
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bulan	-	12	202.406.732,50	12	205.442.833,49	12	208.524.475,99	12	211.652.343,13	12	211.652.343,13	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhinya kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	%	781.950.200,00	70	1.007.509.300,00	75	1.022.621.939,50	80	1.037.961.268,59	95	1.053.530.687,62	95	1.053.530.687,62	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD	Dok	65.209.700,00	46	76.892.644,50	46	78.046.034,17	46	79.216.724,68	46	80.404.975,55	46	80.404.975,55	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Hasil Rekonsiliasi Realisasi SKPD	Keg	78.625.000,00	49	91.162.225,00	49	92.529.658,38	49	93.917.603,25	49	95.326.367,30	49	95.326.367,30	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Daerah	Dok	76.708.000,00	29	95.474.960,00	29	96.907.084,40	29	98.360.690,67	29	99.836.101,03	29	99.836.101,03	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintahan Daerah	Keg	170.472.200,00	1	258.007.519,00	1	261.877.631,79	1	265.805.796,26	1	269.792.883,21	1	269.792.883,21	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dok	216.046.800,00	2	225.034.939,50	2	228.410.463,59	2	231.836.620,55	2	235.314.169,85	2	235.314.169,85	
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dok	69.292.700,00	2	101.074.512,00	2	102.590.629,68	2	104.129.489,13	2	105.691.431,46	2	105.691.431,46	
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dok	105.595.800,00	1	159.862.500,00	1	162.260.437,50	1	164.694.344,06	1	167.164.759,22	1	167.164.759,22	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya kegiatan penyaluran bantuan keuangan/ dana desa, alokasi subsidi, dan pengelolaan dana darurat dan mendesak	%	169.728.000.000,00	75	152.024.796.227,43	80	154.305.168.170,84	90	156.619.745.693,40	95	158.969.041.878,81	95	158.969.041.878,81	
5 02 02 2.04 07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Meningkatnya Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat Berupa Air Bersih	Bulan	2.500.000.000,00	12	2.034.060.000,00	12	2.064.570.900,00	12	2.095.539.463,50	12	2.126.972.555,45	12	2.126.972.555,45	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya sarana pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan, dan prasarana di Desa yang diperlukan oleh desa dan masyarakat	Bulan	157.800.000.000,00	12	145.152.078.977,43	12	143.150.857.306,09	12	145.298.120.165,68	12	147.477.591.968,17	12	147.477.591.968,17	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Untuk Mendukung Kegiatan Yang Bersifat Force Majure dan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pemerintah Daerah	Tahun	9.428.000.000,00	1	4.838.657.250,00	1	4.911.237.108,75	1	4.984.905.665,38	1	5.059.679.250,36	1	5.059.679.250,36	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan, dan prasarana di Desa yang diperlukan oleh desa dan masyarakat	Tahun	-	1	-	1	4.178.502.856,00	1	4.241.180.398,84	1	4.304.798.104,82	1	4.304.798.104,82	
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terpenuhinya kegiatan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah	%	183.750.000,00	75	281.175.300,00	80	285.392.929,50	85	289.673.823,44	90	294.018.930,79	90	294.018.930,79	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya Fasilitas atas Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Bidang Keuangan Daerah	Paket	183.750.000,00	1	281.175.300,00	1	285.392.929,50	1	289.673.823,44	1	294.018.930,79	1	294.018.930,79	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	%	678.585.382,00	70	740.119.740,15	80	751.221.536,25	85	762.489.859,30	95	773.927.207,19	95	773.927.207,19	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya kegiatan pengelolaan barang milik daerah	%	678.585.382,00	70	740.119.740,15	80	751.221.536,25	85	762.489.859,30	95	773.927.207,19	95	773.927.207,19	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, serta mempermudah melakukan evaluasi anggaran yang telah diusulkan oleh masing-masing SKPD	Dok	103.441.500,00	1	108.769.348,80	1	100.000.000,00	1	101.500.000,00	1	103.022.500,00	1	103.022.500,00	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya dokumen terkait kebutuhan barang SKPD	Dok	33.420.000,00	1	41.810.062,70	1	30.000.000,00	1	30.450.000,00	1	30.906.750,00	1	30.906.750,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (Outcome)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya data barang milik daerah sesuai dengan fisik yang ada/tersedia	SKPK	20.000.000,00	49	164.185.882,35	49	149.486.773,26	49	151.729.074,86	49	154.005.010,98	49	154.005.010,98	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Optimalnya data aset terkait Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dok	115.851.000,00	15	208.645.795,40	15	211.775.482,33	15	214.952.114,57	15	218.176.396,28	15	218.176.396,28	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terdapatnya kesesuaian atau akuntabelnya antara data realisasi anggaran dengan data barang milik daerah	Dok	163.510.000,00	10	93.678.714,50	10	95.083.895,22	10	96.510.153,65	10	97.957.805,95	10	97.957.805,95	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tercaipainya Laporan Aset (Barang Milik Daerah) dengan baik	Dok	175.862.882,00	46	123.029.936,40	46	124.875.385,45	46	126.748.516,23	46	128.649.743,97	46	128.649.743,97	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kompetensi dan Pemahaman Terhadap Pengamanan dan Pemanfaatan Aset untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	SKPK	66.500.000,00	0	-	49	40.000.000,00	49	40.600.000,00	49	41.209.000,00	49	41.209.000,00	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah	%	1.063.732.350,00	60	888.756.482,25	70	902.087.829,48	80	915.619.146,93	90	929.353.434,13	90	929.353.434,13	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terpenuhiya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	%	1.063.732.350,00	60	888.756.482,25	70	902.087.829,48	80	915.619.146,93	90	929.353.434,13	90	929.353.434,13	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah terlaksana dengan baik	Dok	46.030.000,00	1	106.729.889,00	1	108.330.837,34	1	109.955.799,90	1	111.605.136,89	1	111.605.136,89	
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Dok	27.375.000,00	1	31.783.101,00	1	32.259.847,52	1	32.743.745,23	1	33.234.901,41	1	33.234.901,41	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) tentang pajak daerah untuk dapat dilaksanakan dengan baik	Dok	229.240.000,00	2	189.086.380,00	2	191.922.675,70	2	194.801.515,84	2	197.723.538,57	2	197.723.538,57	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatnya pengelolaan Pajak Daerah dengan lebih baik	Jenis	73.200.000,00	4	62.930.000,00	4	63.873.950,00	4	64.832.059,25	4	65.804.540,14	4	65.804.540,14	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Adanya Data Objek Pajak Daerah yang lebih baik sesuai keadaan yang sebenarnya	Kec	247.052.850,00	11	206.906.481,25	11	210.010.078,47	11	213.160.229,65	11	216.357.633,09	11	216.357.633,09	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pelaporan Basis Data Pajak daerah terlaksanakan tepat waktu	Kec	121.700.000,00	11	19.482.925,00	11	19.775.168,88	11	20.071.796,41	11	20.372.873,35	11	20.372.873,35	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lebih realistis	Bulan	231.254.500,00	12	175.988.820,00	12	178.628.652,30	12	181.308.082,08	12	184.027.703,32	12	184.027.703,32	

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/kegiatan (<i>Outcome</i>)	Satuan	Kodisi Kinerja Awal RPAS (2022)	Indikator Kinerja (Target) Tahun 2023-2026										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPAS		
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Ketetapan wajib pajak daerah lebih akurat	Bulan	51.940.000,00	12	52.533.659,50	12	53.321.664,39	12	54.121.489,36	12	54.933.311,70	12	54.933.311,70	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya realisasi pajak daerah	Kec	15.940.000,00	11	43.315.226,50	11	43.964.954,90	11	44.624.429,22	11	45.293.795,66	11	45.293.795,66	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah yang baik	Bulan	20.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peningkatan peran serta Perempuan dalam Pembangunan	%	20.000.000,00	50	24.068.492,00	60	24.429.519,38	70	24.795.962,17	80	25.167.901,60	80	25.167.901,60	
2 08 02 2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Terpenuhinya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), dan terpenuhinya kegiatan Dharma Wanita BPKK Aceh Singkil</i>	%	20.000.000,00	50	24.068.492,00	60	24.429.519,38	70	24.795.962,17	80	25.167.901,60	80	25.167.901,60	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional	Keg	20.000.000,00	1	24.068.492,00	1	24.429.519,38	1	24.795.962,17	1	25.167.901,60	1	25.167.901,60	
JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM USULAN				192.125.752.800,00		182.572.485.724,58		185.311.073.010,45		188.090.739.105,61		190.912.100.192,19		190.912.100.192,19	
PAGU INDIKATIF SKPK DESK RENSTRA 2023-2026				192.125.752.800,00		182.572.485.724,58		185.311.073.010,45		188.090.739.105,61		190.912.100.192,19		190.912.100.192,19	



5.2 Program Prioritas dan Sumber Pendanaan

Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD BPKK berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang tertuang dalam rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil tahun 2023-2026, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Dari seluruh program dan kegiatan terdapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (tabel 5.2.1)

TABEL 5.2.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM	KEGIATAN
1	2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah4. Administrasi Umum Perangkat Daerah5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah7. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan daerah3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM	KEGIATAN
1	2
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Pengarusutamaan Gender dan Gender dan Pemberdayaan Pemerdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota



BAB VII
INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil.

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Singkil ini ditampilkan dalam tabel berikut.

Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPKAS

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPKAS	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPKAS
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Opini audit BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Tingkat Pemahaman SKPK dalam menggunakan Aplikasi Barang daerah	60%	60%	70%	80%	85%	95%	95%
3	Persentase Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	0.005%	0.005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%	0,005%
4	Persentase Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	45%	50%	60%	70%	80%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Aceh Singkil. Dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2023-2026 tersebut terdapat hal - hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Perlu ditingkatnya koordinasi antar masing-masing kepala Bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2023-2026 dapat tercapai;
2. Membuat sistim pengumpulan data sehingga mempermudah kinerja tim penyusun Renstra;
3. Melakukan analisa ulang terhadap target indikator kinerja agar dapat tercapai di masa yang akan datang.

Singkil, 08 Februari 2022
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten

HENDRA SUNARNO, SE.Ak, M.Si
NIP. 19790802 200504 1 002